



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Agus Salim¹, Rifki Khoirudin²

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 17, 2025

Revised January 19, 2025

Accepted January 29, 2025

Available online 31 January, 2025

Kata Kunci:

kemiskinan; pengangguran; belanja pemerintah; papua

Keywords

poverty; unemployment; government spending; papua



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor apa saja yang dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan STATA 14. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2010-2021. Data penelitian bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Papua dan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan, belanja pemerintah dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.

ABSTRACT

This study aims to analyze what factors can reduce poverty rates in Papua and West Papua Provinces. This study uses secondary data with a quantitative approach. The analysis tool used is STATA 14. The type of data used in this study is panel data consisting of 29 districts/cities in Papua Province in the period 2010-2021. The research data comes from the official website of the Papua Province Central Statistics Agency and the Annual Report of the Indonesian Ministry of Finance. The results of the study show that government spending and unemployment have a

positive and significant effect on poverty in districts/cities in Papua and West Papua.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial ekonomi yang sering terjadi pada negara-negara di dunia baik di negara-negara berkembang maupun dinegara maju. Pengentasan kemiskinan harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional karena merupakan masalah nasional (Az Zakiyyah et al., 2023). Kemiskinan yang dipandang dari sudut ekonomi dilihat sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hariannya, juga bisa diartikan bahwa pendapatan seseorang yang jauh lebih rendah dari biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan harian, baik konsumsi, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang baik. Sedangkan apabila dipandang dari sudut social, kemiskinan adalah permasalahan social yang biasanya dikaitkan dengan rendahnya Pendidikan, rendahnya keahlian yang dimiliki ataupun tingkat kriminalitas local seperti pencurian dan pemalakan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Noviyati & Khoirudin, 2023) Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimanakeuasaan dan wewenang Pemda bertanggung jawab untuk mengontrol serta mengelola sendiri kebutuhan asset pemerintah. (Salim et al., 2024) Pemahaman buku teks dan model pertumbuhan Solow yang ditambah telah dipelajari untuk menggambarkan konsekuensi pertumbuhan tenaga kerja dan modal.

Beberapa langkah instan yang sering digunakan oleh beberapa negara dalam upaya menekan angka kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai, baik dalam bentuk bahan makan pokok maupun uang tunai, terutama bagi rumah tangga miskin memiliki tingkat kerawanan krisis akses pangan yang lebih tinggi dalam hal kemampuan untuk membeli komoditas pangan (Yuniarti et al., 2022). Percepatan pertumbuhan ekonomi senantiasa dibarengi dengan terdapatnya pembangunan ekonomi nasional (Shara & Khoirudin, 2023). Kondisi kehidupan yang serba kekurangan dimana pengeluaran per kapita dalam satu bulan tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum merupakan diantara indikasi kemiskinan (Wibowo & Khoirudin, 2019). Terdapat upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara melakukan program-program pengentasan kemiskinan dengan berbagai pelatihan dan pendidikan serta menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak. (Haerusman & Khoirudin, 2023) Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi kendala untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih dalam kategori miskin. (Hidayah et al., 2023) Perkembangan pembangunan suatu daerah

*Corresponding author

Email: agus.salim@ep.uad.ac.id

yang semakin majudi era otonomi daerah saat ini, menyebabkan persaingan antar daerahpunmenjadi semakin ketat. (Putra & Khoirudin, 2020) Kemiskinan adalah masalah yang wajib diatasi sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan.

Negara Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah yang belum menemukan solusi terbaik dalam mengatasinya, hal ini tidak terlepas karena negara Indonesia sebagai negara berkembang dan juga negara kepulauan sehingga upaya pengentasan kemiskinan seringkali belum terjadi secara merata di suluruh Indonesia. Globalisasi memiliki dampak negatif terhadap peningkatan kesejahteraan negara-negara miskin, tidak ada jaminan antara peningkatan kemajuan teknologi dan globalisasi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan (Suripto et al., 2020). Pada era ini, sebagian besar pekerjaan di industri dilakukan dengan menggunakan alat-alat berbasis teknologi (Sutrisno et al., 2023). Beberapa daerah telah gagal untuk melihat potensi dari setiap industri yang ada (Asmara & Yekti, 2024). Sejauh ini upaya dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan berebagai macam program baik yang bersifat instan maupun yang bersifat jangka panjang melalui pendidikan dan pelatihan serta penyediaan lapangan kerja seabagai langakah yang efektif di berbagai daerah. (Ayuditya & Khoirudin, 2022) Rencana pengembangan sarana dan prasarana yang cukup besar yang dilakukan oleh pengelola di masa mendatang.

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan dimana pengeluaran per kapita dalam satu bulan tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum (Wibowo & Khoirudin, 2019). Beberapa daerah di Indonesia yang masih tinggi tingkat kemiskinannya diantaranya tesebar di Indonesia bagian timur dimana provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Provinsi Papua menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia sedangkan Provinsi Papua Barat menempati urutan kedua sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 2015 hingga 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua cenderung meningkat di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 859,15 juta jiwa sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 911,37 juta, dan 2021 meningkat mencapai 920,44 angka ini menjadi angka tingkat kemiskinan provinsi tertinggi di Indonesia, aspek perubahan dampak migrasi ikut andil menunjukkan arus migrasi tidak terkendali (Haer & Yuniarti, 2023). Pertumbuhan penduduk yang signifikan menimbulkan kebutuhan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan guna menampung pekerja yang ada (Nurkhasanah et al., 2023). Selanjutnya di urutan kedua adalah Provinsi Papua Barat, tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat menempati urutan kedua sebagai provinsi termiskin di Indonesia, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) dimana tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebsanyak 225,36 juta jiwa, angka ini terus mengalami penurunan disetiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 219,07 juta jiwa.

Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah termiskin di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Papua, beberapa hal yang melatarbelakangi diantaranya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak masih rendah, akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi juga masih rendah. Sarana dan infrastruktur yang belum merata disisi keterbatasan akses lahan merupakan hal yang penting dalam kegiatan pembangunan perkotaan dalam hal penyediaan tempat tinggal bagi penduduk, pusat-pusat kegiatan perkotaan, sarana dan prasarana dasar, jaringan infrastruktur, dan pengembangan pusat-pusat kegiatan baru (Khoirudin et al., 2020) (Vieira & Asmara, 2021). Hal tersebut menjadi factor utama tingginya harga komoditas bahan-bahan kebutuhan konsumsi menjadi lebih mahal. Tingkat korupsi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah juga menambah beban daerah.

Berdasarkan data yang bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Provinsi Papua dan Papua Barta masuk kedalam 10 Provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Di negara-negara berkembang, korupsi merupakan sumber masalah yang merusak tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Guritno et al., 2021). Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal investasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (Suripto et al., 2020).

Beberapa upaya pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dalam upaya menekan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat dirasa kurang terlalu efektif, hal ini dikarenakan seringkali bergantinya rezim pemerintahan merubah arah pembagunan di Papua dan Papua Barat sehingga dampak jangka panjang dari pembangun selalu menjadi hal yang kurang dirasakan oleh masyarakat Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah yang terkanal miskin sebenarnya menyimpan banyak potensi-potensi ekonomi yang sangat besar, sumber daya alam yang banyak dan belum tereksplorasi menjadi potensi Papua dan Papua Barat dimasa depan. (Praningrum & Khoirudin, 2019) Pajak merupakan

sumber keuangan penyumbang terbesar untuk APBN atau APBD yang bersumber dari masyarakat kemudian dipergunakan kembali untuk mensejahterakan masyarakat dan pembiayaan operasional pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2020 mencapai Rp 198,93 miliar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp 235,34 miliar. Berbanding terbalik dengan Provinsi Papua yang mengalami peningkatan PDRB di tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 83.566,22 miliar kemudian naik menjadi Rp 85.072,86 miliar pada tahun 2020. PDRB terdiri dari berbagai macam sektor dimana masing-masing sektor memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian suatu daerah, terutama dapat menghasilkan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Lubis & Az Zakiyyah., 2022). Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi perekonomian berdasarkan data diatas maka dapat kita ketahi bahwa skala perekonomian di Papua lebih besar dari skala ekonomi Provinsi Papua Barat. Penciptaan lingkungan aktivitas ekonomi mengakumulasi modal dan mengembangkannya serta perlu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, investor, karyawan, komunitas sosial, dan lingkungan (Hamdi et al., 2023). Perekonomian suatu negara dikatakan positif salah satunya apabila neraca perdagangan dalam keadaan optimistis atau surplus (Faudzi & Asmara, 2023).

Upaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan di Papua juga didukung oleh anggaran biaya yang tertuang dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sebagai anggaran pembiayaan dari setiap proram kerja atau kebijakan yang dilakukan seharusnya dapat berdampak positif kepada masyarakat atau mengurangi kemiskinan, penguatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri (Khoirudin & Khasanah, 2018). Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada tahun 2021 adalah sebesar 15,8 miliar dimana sebesar 15,7 miliar digunakan dalam belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah yang menggunakan dana paling besar di susunan APBD Provinsi Papua adalah belanja operasional dengan menghabiskan dana mencapai 11,4 miliar. Sedangkan Provinsi Papua Barat menghabiskan dana sebesar 9,7 miliar pada tahun 2020, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,2 miliar.

Factor lain yang menjadi podasi utama dalam membangun perdaban manusia dan menekan angka kemiskinan di Provinsi Papua adalah kualitas sumber daya manusia. Data Badan Pusat Statistika tahun 2021 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua menempati urutan terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia. IPM Provinsi Papua sebesar 60,06 jauh dibawah rata-rata IPM Indonesia sebesar 61,39. IPM yang diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengakses kesehatan dan umur yang panjang, kemampuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan standar hidup yang layak dilihat dari makanan, tempat tinggal serta kebutuhan primer lainnya. Sedangkan IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 sebesar 65,26 persen angka ini meningkat sedikit dari tahun 2020, dimana IPM Papua Barat sebesar 65,09 persen. IPM menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat pembangunan disuatu wilayah, kualitas IMP yang bagus disuatu wilayah akan mendorong perkembangan suatu wilayah.

Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik akan sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Secara umum pendapatan biasanya bersumber dari gaji dari pekerjaan, keuntungan usaha, dan keuntungan investasi. Pendapatan manusia menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan, sehingga hal yang umum berkembang dimasyarakat adalah bahwa seorang individu yang sudah masuk usia kerja pada umumnya akan bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Permasalahan yang sering terjadi adalah jumlah lapang pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah pekerja sehingga mengakibatkan banyak individu yang sudah mampu untuk bekerja tetapi menjadi menganggur. Pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebanyak 75.658 orang dari total 3,379 juta penduduk Provinsi Papua, sedangkan di Provinsi Papua Barat jumlah pengangguran pada tahun 2021 adalah sebanyak 60.851 orang.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi (Yuniarti & Sukarniati, 2021). Penerapan social distancing, PSBB, hingga PPKM, roda perekonomian mulai bergerak lambat dampaknya sistem jadi tidak berjalan dengan baik (Nasir et al., 2022) (Gatari et al., 2024). Permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat namun setiap individu masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat juga harus turut serta dalam membangun perekonomian dalam upaya mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor apa saja yang dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif, untuk melihat fenomena-fenomena serta hubungan yang terjadi menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis yang berkenaan dengan fenomena yang diteliti. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah STATA 14. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2010-2021. Data pada penelitian ini bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Papua dan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Indonesia.

Pendekatan analisis penelitian berupa data panel menggunakan data panel lebih informatif, variative dan mengurangi korelasi. Selain itu data panel juga dapat mengukur dan mengetahui dampak atau pengaruh dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

Model yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independent yang memengaruhi proses pembentukan pertumbuhan ekonomi regional. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KEM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PEM_{it} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

KEM_{it} = Kemiskinan

β = Koefisien regresi

PP_{it} = Pengeluaran Pemerintah

PEN_{it} = Pengangguran

ε_i = Toleransi kesalahan/Standar error

i = Rentang waktu

t = Cross section penelitian

Estimasi data penelitian melakukan uji asumsi klasik berupa normalitas data, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linear (A'yun & Khasanah, 2022). Pemilihan modal regresi data panel dalam melakukan estimasi pemilihan regresi digunakan untuk melihat estimasi model mana yang dapat menjelaskan data dengan baik berupa pendekatan common effect, fixed effect dan random effect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua tahun 2022, persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,98 persen poin yaitu dari 27,53 persen pada Maret 2019 menjadi 26,55 persen pada September 2019. Persentase penduduk miskin di Papua untuk daerah perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 0,27 persen poin menjadi 4,53 persen (4,26 persen pada Maret 2019) sedangkan perdesaan turun sebanyak 1,48 persen poin menjadi 35,36 persen (36,84 persen pada Maret 2019). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan (GK) jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan perkotaan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 66,69%, sedangkan perdesaan sebesar 78,80%.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap GK Provinsi Papua di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, tongkol, tuna, cakalang, kue basah, telur ayam ras dan daging ayam ras. Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap GK di perdesaan adalah ketela rambat/ubi, beras, ketela pohon/singkong, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan gula pasir. Pada periode Maret - September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin berkurang dibanding periode sebelumnya.

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KEM	PE	BP	PENG	IMP
Mean	513532,1161	3236253,7903	1280272132219,0360	3,3402	56,5325
Max	1021759,00	22769655,62	3035206043210,00	13,39	80,16
Min	252132,00	670510,30	639626238994,00	,07	27,87

Hasil analisis deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel kemiskinan (KEM) mempunyai nilai tertinggi sebesar 513532,1161 dan nilai terendah sebesar 1021759,00 dengan rata-rata sebesar 252132,00 dan standar deviasi sebesar 149902,08137. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) mempunyai

nilai tertinggi sebesar 3236253,7903 dan nilai terendah sebesar 22769655,62 dengan rata-rata sebesar 22769655,62 dan standar deviasi sebesar 4454300,76717. Variabel belanja pemerintah (BP) mempunyai nilai tertinggi sebesar Rp.128.0272.132.219,0360 dan terendah sebesar Rp. 3.035.206.043.210 dengan nilai mean sebesar Rp. 639.626.238.994 dengan standar deviasi Rp.397.240.638.921,14860. Variabel pengangguran (PEN) memiliki nilai tertinggi sebesar 3,3402 dan nilai terendah sebesar 13,39. Nilai rata rata sebesar 0,07 dan nilai standar deviasi sebesar 3,40131. Variabel indek pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai tertinggi sebesar 56,5325 dan nilai terendah 80,16 dengan nilai rata rata sebesar 27,87 dan nilai standar deviasi sebesar 11,41007.

Pemilihan model terbaik dengan Uji *chow* bertujuan untuk menentukan apakah model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect* atau model *common effect* berdasarkan hasil pengujian data. Untuk menentukan model terbaik diantara kedua model tersebut dapat diketahui dengan uji signifikansi *fixed effect* dengan melihat nilai F-statistik.

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	130.008.593	25,254	0.0000
Cross-section Chi-square	750.574.823	25	0.0000

Nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0.0000 < \alpha 5\% (0.05)$, dari pengujian di atas maka terbukti bahwa H_0 ditolak. Artinya model terbaik adalah model *Fixed Effect*. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji haussman dikarenakan dari hasil uji *chow* menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Uji haussman digunakan untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan diantara model *random effect* atau model *fixed effect*.

Tabel 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.636.755	6	0.0001

Nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar $0.0001 < \alpha 5\% (0.05)$. Mengacu pada pengujian di atas maka terbukti H_0 ditolak. Artinya model terbaik adalah model *Fixed Effect*. Didapatkan nilai Prob (F-statistic) $0.0000 < \alpha (0.05)$, maka H_0 ditolak. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, pengangguran, dan indek pembangunan manusia (IPM) secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan tabel *fixed effect* nilai *R-Squared* sebesar 0.951278 atau 95%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, pengangguran, dan indek pembangunan manusia (IPM) sebesar 95% dan sisanya sebesar 5% dijelaskan variabel lain di luar model.

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -46 dan nilai probabilitas sebesar $0.00 < 5\% (\alpha = 0.05)$ maka H_0 ditolak. Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi sebesar -46 artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,46%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, antara lain PDRB memberikan kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor produksi perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan jika terjadi peningkatan tenaga kerja (Mankiw, 2003). Apabila PDRB meningkat maka permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan PDRB berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kemiskinan (Patriansyah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Berwulo et al., 2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura.

Nilai koefisien variabel belanja pemerintah sebesar 0.99 dan nilai probabilitas variabel belanja pemerintah sebesar $0.00 < 5\% (\alpha = 0.05)$ maka H_0 ditolak. Artinya, variabel belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi sebesar 0.99 artinya ketika belanja pemerintah naik sebesar 1 triliun, maka kemiskinan akan naik sebesar 0.99%. Pengeluaran pemerintah merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah antara lain terdiri dari belanja oprasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pemerintah perlu mendapat perhatian khusus, dana yang besar digunakan dalam oprasional pemerintah apabila tidak dialokasi dengan tepat maka akan tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat, selain itu dana yang tidak diawasi dengan baik akan rentan terhadap korupsi. Dengan jumlah dana yang besar pengeluaran pemerintah akan mampu

meggerakan perekonomian sehingga apabila perekonomian dapat berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Nilai koefisien variabel pengangguran sebesar -2.37 dan nilai probabilitas sebesar $0.00 < 5\%$ ($\alpha = 0.05$) maka H_0 diterima. Artinya variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi sebesar 2.37 artinya ketika pengangguran naik, maka kemiskinan akan naik sebesar 2.37%. Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang sedang mencari kerja, seseorang yang sedang mempersiapkan usaha, seseorang yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Pada prinsipnya setiap individu akan membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya untuk bertahan hidup, setiap kebutuhan tersebut membutuhkan biaya yang pada umumnya didapatkan dari hasil bekerja atau gaji, hasil usaha atau keuntungan, dan hasil investasi. Sehingga pengangguran yang belum memiliki penghasilan akan menjadi beban tanggung jawab individu lain dalam keluarga yang bekerja, semakin tinggi pengangguran maka akan semakin banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan sehingga akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan.

Nilai koefisien variabel indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar -3.17 dan nilai probabilitas sebesar $0.00 < 5\%$ ($\alpha = 0.05$) maka H_0 ditolak. Artinya variabel independen indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi sebesar -3.17 artinya ketika indeks pembangunan manusia (IPM) naik, maka kemiskinan akan turun sebesar 3.17%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian pembangunan manusia. Di dalam IPM terdapat beberapa komponen yaitu capaian umur panjang serta sehat dimana capaian itu mewakili dibidang kesehatan, dan lamanya bersekolah, angka melek huruf mewakili dibidang pendidikan dan daya konsumsi masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat sesuai pengeluaran perkapita. Dengan adanya investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti munculnya keahlian masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Semakin tinggi tingkatan pendidikan masyarakat maka pengetahuan dan keahlian seseorang juga meningkat dan akan mendorong peningkatan produktifitas kerjanya. Ketika produktifitas kerja seseorang meningkat maka akan menarik perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja. Sehingga menimbulkan penyerapan tenaga kerja meningkat (Pangesti & Prawoto, 2018). Dimana ketika produktivitas kerjanya bagus maka akan memperoleh tenaga kerja yang baik dan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan demikian mereka akan mendapatkan upah atau gaji yang besar ketika dapat memperoleh hasil yang banyak. Oleh karena itu, IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. (Khoirudin et al. 2023) Dalam jangka pendek, jumlah penduduk tidak mempunyai dampak signifikan terhadap ekspor udang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh mengenai pengujian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat. Yaitu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.

Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Artinya kenaikan Belanja pemerintah tidak diikuti penurunan kemiskinan. Hal ini dikarenakan setiap adanya kenaikan Belanja pemerintah tidak dibarengi dengan pengelolaan dan alokasi terhadap pembangunan yang bersifat produktif. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Artinya setiap terjadi kenaikan pengangguran akan diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Artinya setiap terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.

Adanya tren positif pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dapat terus dijaga dan ditingkatkan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Kebijakan yang menitikberatkan pada sektor prioritas, strategis, dan potensial yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah daerah dalam usaha menekan tingkat kemiskinan. Dalam rangka pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat pemerintah daerah perlu mengelola dan mengalokasikan belanja pemerintah terhadap pos pembangunan yang bersifat produktif sehingga nilai kontribusi Belanja pemerintah yang selalu naik bisa dioptimalkan untuk menekan tingkat kemiskinan.

Pemerintah Daerah perlu mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Memaksimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka pembangunan daerah yang menjadi

prioritas nasional

REFERENSI

- A'yun, I. Q., & Khasanah, U. (2022). The Impact of Economic Growth and Trade Openness on Environmental Degradation: Evidence from A Panel of ASEAN Countries. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(1), 81–92. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.13881>
- Asmara, G. D., & Yekti, F. A. (2024). An Analysis of Leading Sectors in Sleman District. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 248–258. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.595>
- Ayuditya, D., & Khoirudin, R. (2022). Valuasi Ekonomi Untuk Obyek Wisata Di Pantai Menganti Kebumen Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 13(1), 69–78.
- Az Zakiyyah, N.A, Lubis, F.R.A, & Wahyuni, I. (2023). Determinants of poverty in Indonesia. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(2), 210–222. <https://doi.org/10.24197/st.2.2021.243-267>
- Faudzi, M., & Asmara, G. D. (2023). Analisis Neraca Perdagangan Indonesia: Pendekatan ARDL. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.17>
- Gatari, A. P., Asmara, G. D., & Khasanah, U. (2024). Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Sektor Unggulan Guna Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Madiun. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(3), 1470–1484.
- Guritno, D. C., Kurniawan, M. L. A., Mangkunegara, I., & Samudro, B. R. (2021). Is There Any Relation Between Hofstede's Cultural Dimensions And Corruption In Developing Countries? *Journal of Financial Crime*, 28(1), 204–213. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0115>
- Haer, J., & Yuniarti, D. (2023). Migrant Labor Determinants: Do Socio-Economic Factors Affect? *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 117–130. <https://doi.org/10.15408/sjie.v12i1.31274>
- Haerusman, A., & Khoirudin, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2022. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i1.20>
- Hamdi, M., Indarti, N., Manik, H. F. G. G., & Lukito-Budi, A. S. (2023). Monkey see, monkey do? Examining the effect of entrepreneurial orientation and knowledge sharing on new venture creation for Gen Y and Gen Z. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 15(4), 786–807. <https://doi.org/10.1108/JEEE-08-2021-0302>
- Hidayah, P. N., Khoirudin, R., & Nasir, M. S. (2023). Analisis Sektor Potensial Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Pendekatan Dynamic Location Quotient (DLQ). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(1), 131–144. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v16i1.306>
- Khoirudin, R., Adi, P.H., & Suharno. (2023). Analysis of Indonesian Shrimp Exports to The United States Trough ECM Approach. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 1(1), 1–10.
- Khoirudin, R., & Khasanah, U. (2018). Valuasi Ekonomi Objek Wisata Pantai Parangtritis, Bantul Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(2), 152–166. <https://doi.org/10.21002/jepi.2018.09>
- Khoirudin, R., Wahyuni, S., & Budi Nugraha, C. (2020). Distribution of Optimized Public Assets Utilization in Yogyakarta Province. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 19(1), 48–62. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v19i1.3757>
- Lubis, F.R.A., & Az Zakiyyah, N.A. (2022). Analysis of Factors Affecting Regional Original Revenue In Nusa Tenggara Timur (2015-2020). *EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 17(2), 108–118. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2022.17.2.2970>
- Nasir, M. S., Kurniawan, M.L.A, Andriyani, N., Wibowo, A. R., & Oktaviani, Y. (2022). Credit Guarantee the National Economic Recovery Program (PEN) for MSMEs: A Case Study of MSMEs for Bank Pembangunan Daerah DIY. *Ekilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 17(2), 158–170. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v17i2.2022.pp158-170>
- Noviyati, A. M., & Khoirudin, R. (2023). Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jae.v1i2.115>
- Nurkhasanah, N., Asmara, G. D., & A'yun, I. Q. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur 9 Provinsi di Indonesia Periode 2011 - 2021. *Jurnal HUMMANSI (Humaniora Manajemen Akuntansi)*, 2(1), 107–114.
- Praningrum, A.W.A., & Khoirudin, R. (2019). Determinan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 58–64. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3580>

- Putra, D., & Khoirudin, R. (2020). Tingkat Kemiskinan di Sumatra Selatan dan Analisisnya. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 127-133.
- Salim, A., Wen, J., Bello, A.U., Lubis, F.R.A., Khoirudin, R., Khasanah, U., Sukarniati, L., & Nasir, M.S. (2024). Does information and communication technology improve labor productivity? Recent evidence from the Southeast Asian emerging economies. *Growth and Change*, 55(1). <https://doi.org/10.1111/grow.12708>
- Shara, Y., & Khoirudin, R. (2023). Analisis Jangka Pendek dan Panjang Foreign Direct Investment di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.18>
- Suripto, Firmansyah, & Sugiyanto, F. X. (2020). Poverty viewed from the perspective of domestic production in Yogyakarta: The Solow growth model approach. *International Journal of Business and Globalisation*, 24(2), 174–184. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2020.105166>
- Sutrisno, E. Y., Hidayat, A. C., & Sutanto, A. (2023). Pemanfaatan E-Commerce dan Property Management System Dalam Kegiatan Bisnis Perhotelan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 85–98. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.85-98>
- Vieira, I., & Asmara, G. D. (2021). A Study of Hospital Competition in Yogyakarta City with Huff ' s Gravity Model and Valuation Methods. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.12928/jampe.v3i1.8922>
- Wibowo, A. R., & Khoirudin, R. (2019). Analysis of Determinants of Poor Population in Central Java 2008-2017. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v14i1.1482>
- Yuniarti, D., Purwaningsih, Y., Soesilo, A., & Suryantoro, A. (2022). Food Diversification and Dynamic Food Security: Evidence from Poor Households. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 23(1), 43–55. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.16302>
- Yuniarti, D., & Sukarniati, L. (2021). Penuaan Petani dan Determinan Penambahan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian. *Agriekonomika*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9789>